

**SANKSI HUKUM ASSAHIR DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

(S1) Dalam Ilmu Syariah Jurusan Hukum

Pidana Islam Fakultas Syariah Dan

Hukum UIN Sumatera Utara

Oleh:

YAYUK ANNISA

NIM: 25.15.3.015



FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2020 M/ 1440 H

**SANKSI HUKUM AS-SAHIR DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM**

Oleh

YAYUK ANNISA
NIM. 25. 15. 3. 015

Menyetujui

PEMBIMBING I



Dr. Budi Sastra Panjaitan, SH. M.Hum
NIP. 19760420 200901 1 009
010

PEMBIMBING II



Annisa Satiya, SH, M.Hum
NIP. 19840719 200901 1

Mengetahui,
Ketua Jurusan Jinayah



Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
NIP. 19810828 200901 1 011

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YAYUK ANNISA

Nim : 25.15.3.015

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Judul Skripsi : **SANKSI HUKUM ASSAHIR DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah hasil karya saya kecuali kutipan-kutipan yang di dalamnya disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensinya apabila pernyataan ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 07 Agustus 2020

YAYUK ANNISA

NIM. 25.15.3.015

IKTISHAR

Di Indonesia sihir dikenal dengan bermacam-macam istilah yaitu seperti santet, teluh, ataupun guna-guna. Santet adalah salah satu praktik sihir yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang bertujuan untuk mencelakakan orang lain seperti penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang yang dikehendakinya. Merupakan jenis ilmu sihir untuk mengendalikan suatu kejadian, obyek, orang dan fenomena lainnya secara mistis atau supranatural dengan perantara orang yang ahli dalam bidangnya (paranormal ilmu hitam). Ilmu hitam identik dengan sihir dengan tujuan kearah negatif, karena sifatnya yang mencelakakan bahkan dapat membahayakan nyawa orang lain. Adapun sanksi terhadap pelaku sihir/santet bahwasannya Al-Quran dan as-Sunnah jelas menyebutkan hukum melakukan sihir ialah kafir. Adapun mengenai hukumannya terhadap pelaku sihir para jumbuh ulama berbeda pendapat dalam segi hukumannya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *normatif* yaitu melaksanakan studi kepustakaan sesuai target yang ada terkait judul yang disebutkan di atas penelitian ini juga bisa disebut juga penelitian normatif , mengumpulkan data dan bahan-bahan dengan cara mencari buku-buku dan analisis data yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Tindak Pidana santet/sihir dalam hukum pidana Islam dapat di pidana apabila bukti dapat di hadirkan, apabila orang yang menyantet/melakukan sihir mengakui bahwa dia dapat membunuh orang dengan sihir tersebut maka dia di hukum *qishas* sama seperti pembunuhan sengaja (*qathl amd*), dan apabila pelaku santet (as-sahir) melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aqidah Islam seperti mengandung unsur kesyirikan sehingga menyebabkan dia *murtad* maka dalam hal ini dia di hukumi *riddah* dan wajib di *had* (hukum *hudud*) apabila dia tidak segera bertaubat sebagaimana dalam al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 102.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran Islam guna menyelamatkan manusia dari kejahilan menuju hidayah dalam naungan Allah SWT.

Sudah menjadi suatu kewajiban bagi setiap mahasiswa/i yang ingin menyelesaikan tugas studinya di Perguruan Tingkat Tinggi untuk menyusun sebuah laporan akhir perkuliahan, yaitu penyusunan Skripsi. Adapun judul Skripsi yang penulis angkat adalah “*Sanksi Hukum Assahir dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*).”

Akhirnya dengan bantuan dari segala pihak skripsi inipun dapat penulis selesaikan dengan segala kekurangannya penulisan skripsi inipun tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, tidak ada kata yang pantas dapat penulis ungkapkan kecuali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, baik itu kesehatan Rohani maupun Jasmani sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Ayahanda tercinta Suliadi dan Ibunda tercinta Syafrida yang telah membimbing, mendidik, memotivasi dan mendoakan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang. Karena beliau lah skripsi ini dapat terselesaikan dan berkat kasih sayang dan pengorbanannya lah penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan Sarjana Hukum (SH) DI UIN

Sumatera Utara Medan. Tak lupa pula kepada saudara kandung saya Alfitrah Laila, Syafiq affan, dan Khaliqah Azzarqani serta yang telah memberikan motivasi dan perhatiannya selama ini;

3. Bapak Prof. Dr. TGS. Saidurahman, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan;
4. Bapak Dr. Zulham, M.Hum. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan;
5. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum dan bapak Drs. Ishaq, M.A. Selaku Ketua Jurusan sekaligus pembimbing akademi penulis dan Sekertaris Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan;
6. Bapak Dr. Budi Sastra Panjaitan M.Hum selaku dosen Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran yang berguna selama proses penyelesaian skripsi ini;
7. Ibu Annisa Sativa M.Hum Selaku Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran yang berguna selama proses penyelesaian skripsi ini;
8. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, yang telah memberikan ilmu kepada Penulis sejak berada di bangku kuliah;
9. Kepada RidwanSyah Harefa yang telah memberikan motivasi dan menemani penulis selama proses penyelesaian skripsi ini;
10. Kepada teman seperjuangan Yaumi Fajar, Sindy Arika Putri Nst, AyuTriana, Febby Rizki Suriani Lbs, Arifin Siahaan, yang telah

membantu dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

11. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinyah) Angkatan 2015 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, tiada kata yang diucapkan selain ucapan terima kasih dan permohonan maaf jika dalam kebersamaan kita selama kurang lebih 4 (empat) tahun ada sesuatu kekhilafan yang pernah dilakukan;
12. Serta semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu;

Mudah-mudahan Allah S.W.T. membalas semua amal kebaikan dan keikhlasan mereka sebagai amal shalih kelak di akhirat. Kritikan dan saran yang bersifat membangun dan melengkapi karya tulis ini sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Medan, 15 Maret 2020
Penulis

YAYUK ANNISA
NIM: 25.15.3.015

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain		apostrof terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	,	Apostof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِى	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
اِو	<i>fathah</i> dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِ ... اِ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	ā	a dan garis di atas
اِى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	i	i dan garis di atas
اِو	<i>ḍammah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat *harkat fathah, kasrah, dan ḍammah*, yang transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat *harkat sukun* transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*) serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka

ta' marbutah itu transliterasinya dengan (h).

5. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Jika huruf di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ) maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* menjadi (i).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf (ء) *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari al-Qur'an), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun *ta’ marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalalah* ditransliterasi dengan huruf (t).

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).

DAFTAR ISI

	Halaman
Persetujuan	i
Pengesahan	ii
Ikhtisar.....	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Batasan Istilah	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Tinjauan Pustaka	6
G. Kerangka teoritis	8
H. Hipotesis.....	12
I. Metode Penelitian	12
J. Sistematika Penelitian	15

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AS-SAHIR DALAM HUKUM**PIDANA ISLAM**

A. Pengertian Tindak Pidana <i>Assahir</i>	16
B. Dalil-dalil Hukum Tentang <i>Assahir</i>	18
C. Hubungan <i>Assahir</i> dengan <i>Riddah</i> (Murtad).....	19

BAB III AS-SAHIR DAN PEMBUKTIANNYA MENURUT HUKUM

PIDANA ISLAM DAN RUU KUHP VERSI PEMERINTAH

- A. Pembuktian *Assahir* Menurut Hukum Pidana Islam 25
- B. Pembuktian *Assahir* Menurut RUU KUHP Versi Pemerintah.. 33

BAB IV SANKSI BAGI PELAKU AS-SAHIR DALAM HUKUM PIDANA

ISLAM DAN RUU KUHP VERSI PEMERINTAH

- A. Sanksi Pelaku *Assahir* dalam Hukum Pidana Islam..... 35
- B. Sanksi Pelaku Santet Menurut RUU KUHP Versi Pemerintah 43
- C. Analisis Persamaan dan Perbedaan *Assahir* dalam Hukum Pidana
Islam dan RUU KUHP Versi Pemerintah 47

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 52
- B. Saran..... 55

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana merupakan salah satu dari bagian yang menjadi salah satu aspek pokok dalam kehidupan masyarakat yang sangat penting, sebagai wujud perlindungan dan demi terjaganya keamanan agar terlindung dari perbuatan yang merugikan dari perseorangan maupun kelompok.

Hukum pidana baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam tentu mempunyai peran masing-masing dalam mewujudkan tujuan hukum seperti yang diatas dan hal ini wajib di diketahui oleh semua orang sebagai bentuk pencegahan dan pedoman hidup bermasyarakat, demi tercapainya keamanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang baik dan aman. Agama Islam merupakan agama yang sempurna yang diturunkan Allah kepada umat Nabi Muhammad *Shalallahu alaihi wa salam* yang mengatur setiap aspek kehidupan umatnya dalam segala hal apapun termasuk mengatur dalam aspek hukum.

Dalam fungsinya sebagai pelindung kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Adapun hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai dan tujuan pokok hukuma dalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuan itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antara perorangan didalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara

memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹ Hukum bagi sebagian kalangan sering dianggap sebagai perangkat paling baik dan paling memungkinkan untuk menghentikan perselisihan di kehidupan sosial. Anggapan ini munculkan dari sebuah keyakinan bahwa hukum merupakan instrumen yang netral dari berbagai nilai atau kepentingan kelompok sosial tertentu. Hukum harus dipatuhi persis karena hukum merupakan pembedaan dari kepentingan universal; kepentingan semua warga terlepas dari latar belakang ekonomi masing-masing. Hukum harus dipatuhi agar kehidupan berjalan tertib.²

Hukum secara umum merupakan seperangkat peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya. Dalam agama Islam hukum bersumber dari aturan dan ketetapan Allah yang dipahami dari Wahyu yang tertulis didalam kitab suci *Al-Qur'an* dan Pengambilan contoh dari pada *sunnah* Nabi-nabi yang di utus oleh Allah. Fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia dengan cara mengatur kegiatan manusia, sedangkan kepentingan manusia sangatlah banyak dan tidak terhitung jumlah dan jenisnya. Disamping itu kepentingan manusia akan berkembang sepanjang masa. Oleh karena itu peraturan hukum yang kurang jelas harus dijelaskan, yang kurang lengkap harus dilengkapi dengan jalan menemukan hukum agar aturan hukum dapat diterapkan terhadap peristiwanya. Sehingga dapat mewujudkan

¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2005), h. 77

²Petrus C.K.L. Bello, *Ideologi Hukum*, (Bogor. Insan Merdeka, 2013), h. 3

putusan hukum yang diidam-idamkan, yaitu yang mengandung aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.³

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam kebijakan penegak hukum. Disamping itu, karena tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegak hukum inipun termasuk kedalam kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, penggunaan hukum pidana sebenarnya bukan merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternative. Dengan demikian, masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana bukan hanya merupakan masalah sosial, tetapi juga masalah kebijakan (*the problem of policy*).⁴

Sehubungan dengan itu hukum perlu dikaji atau di telaah lebih mendalam untuk menjawab berbagai permasalahan-permasalahan hukum yang sedang berkembang. Diantara permasalahan permasalahan hukum yang sedang berkembang tersebut, penulis ingin mencoba menggali lebih dalam mengenai hukum atau sanksi hokum terkait masalah *Assahir*.

Assahir merupakan masalah klasik yang muncul bersamaan dengan adanya rasa tamak pada manusia yang tertuang dalam perasaan cemburu, iri,

³Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Menemukan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UII Pers, 2006), h 28

⁴ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2010), h. 20

dengki, senang berkuasa dan membalas dendam. Hubungan ini telahterjalin sejak lama, yakni sejak hari-hari pertama keberadaan manusia dimuka bumi hingga sekarang sesuai dengan kondisi dan keyakinan mereka, dalam hal ini santet merupakan perkara ghaib yang diyakini eksistensinya didalam masyarakat terutama di Indonesia sebagai negeri yang kental akan nilai spritual dan budaya sehingga santet merupakan hal yang menjadi prolematika dalam masyarakat Indonesia.

Di Indonesia, kehidupan spiritual tampaknya juga tidak pernah redup. Memang agama, bagi masyarakat Indonesia selain merupakan bagian dari tradisi itu sendiri, tampaknya adalah suatu identitas sekaligus sumber moral dan spiritual yangtak mungkin ditinggalkan.⁵ Kebudayaan adalah kompleks yang mengungkap pengetahuan kepercayaan, kesenian dan moral. Didalam kebudayaan bermacam kekuatan yang harus dihadapi seperti kekuatan gaib maupun kekuatan lainnya, selain itu manusia dan masyarakat juga memerlukan kepuasan dibidang spiritual maupun materil. Selainyang kompleks diatas, adapun kaidah-kaidah yang dinamakan peraturan biasanya sengaja dibuat dan mempunyai sanksi tegas. Peraturan bertujuan membawa suatu kerahasiaan dan memperhatikan hal-hal yang bersangkutan dengan keadaan lahiriah maupun batiniah.⁶

Assahir adalah sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang untuk melakukan tipu daya. *Assahir* dapat dimaknai sebagai sihir atau di Indonesia dikenal sebagai santet.

⁵Ahmad syafi'I Mufid, *Tangklukan, Abangan, dan Tarekat* ,cet I (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), h. 7

⁶Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers,1990), h. 45

Santet dalam Islam dikenal dengan istilah sihir sedangkan pengertian sihir sendiri yaitu:

هو ما يفعله الساحر من الحيل والتخيلا، التي تحصل بسببها للمسحور ما يحصل من الخواطر الفاسدة الشبيهة بما يقع لمن يرى فيظنه ما⁷

“Sihir adalah sesuatu yang dikerjakan oleh tukang sihir daritipu daya (Jin) dan perkara tahayul, dengan cara itu bisamenyebabkan kekhawatiran bagi seseorang yang kena sihir(korban) mengalami cacat seperti apa yang diperkirakan (disugestikan) oleh perbuatan penyihir dengan caramemvisualkan seorang yang dituju dengan media air.”

Di Indonesia sihir dikenal dengan bermacam-macam istilah yaitu seperti santet, teluh, ataupun guna-guna. Indonesia sendiri belum punya payung hukum mengenai *Assahir* (pelaku santet) ini. Karenanya bila ada orang yang diduga pelaku santet tidak bisa dijerat dengan hukum, akibatnya masyarakat yang menjadi korban santet sering main hakim sendiri bahkan orang yang diduga dukun santet sering dibunuh warga tanpa pembuktian. Pakar kriminologi Universitas Indonesia (UI) Prof.Dr.Ronny Nitibaskara mengatakan penerapan Pasal santet bisa melindungi orang-orang yang difitnah melakukan santet. Karena dengan adanya itu maka mereka yang difitnah melakukan santet tidak bisadimain hakim sendiri,⁸ sedangkan dalam istilah santet dalam hukum pidana Islam bisa dikenal sebagai sihir. Para ulama telah sepakat bahwa mempelajari dan mengajarkan sihir hukumnya haram dan meyakini dibolehkannya sihir hukumnya *syirik* dan *murtad*.

⁷Al fara'i, *Fathul Qodir jilid 1*, (Darul Ma'rifat, Beirut Libanon, tt), h. 240

⁸ungkap Ronny dalam diskusi '*Pasal Santet Dalam Naskah Revisi UU KUHP*' di Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, [http://: www.detiknews.com](http://www.detiknews.com), diakses pada, Rabu (14/1/2020).

Akan tetapi dalam hal ini para ulama berbeda pendapat mengenai hukum orang yang melakukan perbuatan *sihir* (santet) menurut madzhab Imam Malik, madzhab Imam Abu Hanifah dan madzhab Imam Ahmad, penyihir hukumnya adalah kafir karena mempelajari sihir dan mengajarkannya baik meyakini haramnya atau tidak meyakini haramnya oleh karena itu harus dihukum bunuh tanpa diminta taubat.⁹ Adapun *Assahir* (pelaku santet) belum diatur didalam Undang-Undang Pidana Indonesia, oleh karenanya para pakar dan ahli hukum pidana sangat berantusias menyarankan pemerintah agar segera membuat Undang-undang terkait santet atausihir ini, dengan mempertimbangkan isu-isu atau polemik yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Atas desakan itu akhirnya pemerintah memasukkan santet kedalam RUU KUHP versi pemerintah. Dalam kitab tersebut pasal 293 disebutkan bahwa orang yang membantu atau menawarkan jasa untuk melakukan tindak pidana dengan cara gaib dapat diancam hukuman penjara maksimal 5 tahun. Tentu dari munculnya beberapa wacana dibuatnya pasal santet dalam undang-undang ini menimbulkan banyak polemik dikalangan masyarakat, oleh sebab itu peneliti mencoba menulis skripsi dengan judul ***“Sanksi Assahir Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”***.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sanksi Hukum *Assahir* (Pelaku santet) menurut Hukum Pidana Islam?

⁹ Ahmad Wardi muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 124

2. Bagaimanakah Sanksi Hukum terhadap pelaku santet menurut RUU KUHP versi pemerintah ?

C. Batasan Masalah

Untuk memudahkan pemahaman pada beberapa istilah dalam masalah yang dibahas yakni terkait Istilah *Santet*, dalam hal ini *Santet* diartikan sebagai tindak pidana sihir yang akan dibahas dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

D. Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa objek kajian yang terdapat dalam kajian ini diantara objek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Sanksi Hukum *Assahir* (Pelaku santet) dalam Hukum Pidana Islam;
2. Untuk mengetahui Sanksi Hukum terhadap pelaku santet menurut RUU KUHP versi pemerintah.

E. Kegunaan Penelitian

1. Untuk menambah pengetahuan masyarakat terutama mahasiswa tentang konsep dan bentuk tindak pidana santet dalam perspektif hukum pidana Islam;
2. Untuk menjadi tambahan referensi dalam kajian pengembangan seputar hukum pidana;
3. Untuk memenuhi sebagian dari persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

F. Tinjauan Pustaka

Dilihat dari topik umum yaitu Tindak Pidana *Assahir* (pelaku santet) dalam pandangan hukum pidana Islam, tentu peneliti sebelumnya pernah membahas dan mengkaji penelitian yang sudah ada sebelumnya yang pertama berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Santet di Indonesia” Oleh Tosim Fauzi, yakni tentang kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana santet bahwa yang dimasukkan/diatur dalam konsep KUHP, bukan delik santet tetapi delik yang berhubungan dengan masalah santet (kekuatan gaib/metafisika/supranatural), khususnya yang berkaitan dengan penawaran bantuan jasa/sarana dari seseorang yang mengaku mempunyai keahlian supranatural (kekuatan gaib/*metafisika*) untuk melakukan suatu kejahatan/tindak pidana. Dalam mengkriminalisasikan perbuatan yang berhubungan dengan persantetan, RUU KUHP versi pemerintah hanya menitik beratkan perhatiannya pada usaha pencegahan (prevensi) dilakukannya praktik santet oleh para juru/tukang santet, yang akan dicegah/diberantas ialah profesi atau pekerjaan tukang santet yang memberikan bantuan kepada seseorang untuk menimbulkan kematian atau mencelakakan/menderitakan orang lain.

Kedua, berjudul “Hukuman Pelaku Santet (Tinjauan RUU KUHP Dan Hukum Pidana Islam” oleh Waskita Agung Nugroho yang membahas seputar perbuatan santet yang merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Santet merupakan salah satu praktik sihir yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain agar orang tersebut merasakan penderitaan ataupun tujuan tertentu lainnya. Santet pun dapat dilakukan oleh seorang ahli sihir atas permintaan orang lain yang meminta bantuannya, ataupun atas kehendak si ahli sihir itu sendiri. Dalam RUU KUHP versi pemerintah,

hukuman bagi pelaku santet (ahli sihir) dinyatakan dalam Pasal 293 dengan sanksi pidana 5 tahun penjara ataupun denda paling banyak kategori IV, sedangkan, dalam hukum pidana Islam, sanksi bagi pelaku santet ditentukan dalam Q.S. Al-Baqarah (2) : 102 yang menyatakan bahwa pelaku santet ialah kafir. Dikarenakan dalah nash tidak diperincisecara jelas, maka para fuqaha pun menentukan sanksi santet ini berdasarkan pandanganya masing-masing, yang kebanyakan dari para fuqaha menyatakan bahwa hukuman bagi pelaku santet ialah dihukum mati.

Ketiga berjudul “Sihir Dalam Al-Quran(Studi Komparasi Tafsir al-Manar karya M. Abduh dan Tafsir al-Misbah karya M.Quraish Shihab)” oleh Uswatun Khoeriyah dari skripsi membahas seputar sihir dari kacamata ilmu tafsir dalam perbandingan antara 2 tafsir yankni tafsir.yakni Tafsir al-Manar dan tafsir al-Misbah menjadi objek kajian penelitian yang penulis lakukan. Al-Manar sebagai kitab tafsir yang bercorak *Adabi Ijtima’i* memiliki karakteristik rasionalitas yang tinggi dalam penafsirannya serta cenderung menghindari pembahasan hal-hal gaib. Sedangkan al-Misbah sebagai tafsir yang lahir di Indonesia memiliki karakteristik *tafsir bil ra’yi* juga *bil ma’tsur* justru cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan penafsiran menggunakan rasionalitas tafsir. Dalam beberapa penelitian tersebut membahas seputar bentuk studi komparatif tentang hukum dan sanksi tindak pidana Assahir (Santet) dalam perspektif hukum pidana Islam dan positif. Akan tetapi jika dilihat dari kekhususannya tiap-tiap judul penelitian pastilah berbeda sebagaimana judul skripsi penulis yaitu “*Sanksi Assahir Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*”.

Walaupun antara judul penelitian dan skripsi ini berbeda tetapi penelitian sebelumnya sudah cukup memberikan gambaran dalam penyelesaian skripsi ini.

G. Kerangka Teoritis

Tindak pidana dalam istilah hukum pidana Islam disebut *jarimah*.

Adapun tindak pidana menurut Abdul Qadir Audah:

فَالْجَرِيمَةُ إِذَنْ هِيَ إِتَيْنُ فِعْلٍ مُحَرَّمٌ مُعَاقِبُ عَلَى فِعْلِهِ أَوْ تَرْكُ فِعْلٍ مُحَرَّمٍ التَّزَكُّ
مُعَاقِبُ عَلَى تَرْكِهِ، أَوْ هِيَ فِعْلٌ أَوْ تَرْكُ نَصَتْ الشَّرْعَةَ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَلِعِقَابِ
عَلَيْهِ.¹⁰

Artinya: “jarimah adalah melakukan perbuatan yang diharamkan yang apabila melakukannya mengakibatkan ancaman sanksi hukum tertentu, atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang, yang diancam sanksi hukum tertentu apabila tidak melakukannya atau dengan kata lain, melakukan atau meninggalkan (perbuatan) yang keharamannya telah ditetapkan oleh syariat dan adakalanya ancaman hukuman tertentu”.

Adapun bentuk pembagian dari pengklasifikasian Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam dibagi terhadap 3 pembagian yang ditinjau dari segi hukumnya yaitu *Jarimah Hudud*, *Jarimah Qishash* dan *Diat*, dan *Ta'zir*. *Jarimah Hudud* yaitu jarimah yang sanksinya ditetapkan oleh Allah dan menjadi hak Allah memberikan sanksinya tanpa ditambahi maupun dikurangi yang bertujuan sebagai sanksi dan pencegah untuk manusia melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT. *Hudud*, jamak dari kata *haddun* yang mempunyai arti mencegah, karena ia mencegah dari perbuatan yang jelek,¹¹ yakni dari kejahatan yang dikenai *had* atau *hudud* sebagai bentuk

¹⁰ Abd Qadir Audah, *Tasri' al-Jinai a-Islamiy*, Juz I, (Cairo: Daar Hadits, 2009), h. 55

¹¹ Muhammad Abi Qasim al-Ghazi, *Fathul Qarib Mujib*, (Jakarta : Dar Qutub al-Islamiyyah, 2003), h. 130

ganjaran penebusan dosa yang dilakukan yang ditetapkan oleh Allah swt langsung.

Adapun hudud menurut Abdul Qadir Audah:

وَالْحَدُّ هُوَ الْعُقُوبَةُ الْمُقَدَّرَةُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: “Hukuman *Had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *Syara'* dan merupakan hak Allah”.¹²

Sihir merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

هو ما يفعله الساحر من الحيل والتخيلا, التي تحصل بسببها للمسحورما
يحصل من الخواطر الفاسدة الشبيهة بما يقع لمن يرى فيظنه ما¹³

Artinya: “Sihir adalah sesuatu yang dikerjakan oleh tukang sihir dari tipu daya (Jin) dan perkara tahayul, dengan cara itu bisa menyebabkan kekhawatiran bagi seseorang yang kena sihir (korban) mengalami cacat seperti apa yang diperkirakan (disugestikan) oleh perbuatan penyihir dengan cara memvisualkan seorang yang dituju dengan media air.”

Kaum *animis*¹⁴ percaya bahwa badan manusia terdiri dari roh menyatu dengan pernafasan dan bayangan yang merasuk ke badan astralnya (fisik) yang berasal dari darah daging. Sesudah meninggal, roh tetap memegang sifat-sifat rohnya ketika badan astralnya hidup. Roh beberapa orang mempunyai kemampuan untuk berpindah ke orang lain atau binatang, orang dan binatang yang dipilih untuk dirasuki, dapat diatur sesuai dengan kemauan pemiliknya, terkadang roh juga dapat dimasukkan dalam benda yang sebelumnya tidak

¹² Abd Qadir Audah, *Tasri' al-Jinai a-Islamiy, Juz I*, h. 65

¹³ Al fara'i, *Fathul Qodir jilid I*, (Darul Ma'rifat, Beirut Libanon, tt), h. 240

¹⁴ Sebuah paham kepercayaan yang mempercayai benda benda diluar manusia yang mereka anggap sebagi tuhan, dimana kepercayaan ini lahir dari masyarakat primitive yaitu masyarakat yang masih sederhana dalam berfikir artinya bahwa masyarakat dalam fase pertama dalam unsure kepercayaan (animism dan dinamisme) manusia memuja dan menyembah benda benda serta peristiwa alam yang menakutkan dan menyenangkan. Lihat, K.Sukardi, *Agama Agama yang berkembang didunia dan pemeluknya*, (Bandung, tanpa penertbit, 1993), h. 55

berjiwa. Inilah cara yang digunakan seseorang untuk membalas dendam dengan memanfaatkan benda yang tak berjiwa untuk diisi.¹⁵

Adapun orang yang mempelajari ataupun mengajarkan sihir itu diharamkan sebab didalam mempelajari ilmu sihir terdapat kesyirikan dan syirik adalah salah satu dari dosa besar, namun hal ini menimbulkan tafsil yang berbeda-beda ada yang mengatakan jika mengandung hal-hal yang menyebabkan kekufuran, maka pelakunya kafir atau bisa mengugurkan keIslamannya (*Murtad*), Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 102:

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا

Artinya: “Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir).”

Imam Adz Dzahabi berdalil dengan ayat di atas untuk menegaskan bahwa orang yang mempraktekkan ilmu sihir, maka dia telah kafir. Karena tidaklah para syaitan mengajarkan sihir kepada manusia melainkan dengan tujuan agar manusia menyekutukan Allah ta’ala.¹⁶

Riddah adalah kembali/keluar dari agama Islam dengan cara meninggalkan agama Islam atau meninggalkan kebenaran dari agama Islam.

¹⁵Suyono R.P, *Dunia Mistik Orang Jawa Roh, Ritual, Benda Magis*, LKIS, 2007, Yogyakarta

¹⁶ Ibnu Utsaimin, *Syarah Al Kabaair Lil Imam Adz Dzahabi*, (Jakarta: Daar Al Kutub ‘Ilmiyah, 2003), h. 20

وَهِيَ شَرْعًا الرَّجْعُ عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ إِلَى الْكُفْرِ سَوَاءً بِنِّيَّةٍ أَوْ بِفِعْلِ الْمُكَفِّرِ أَوْ
بِقَوْلٍ¹⁷

Artinya: "Sedangkan menurut syara' *riddah* merupakan kembali kepada kekafiran, baik dengan niat, perbuatan yang menyebabkan kekafiran, atau dengan ucapan".

Dari definisi tersebut *riddah* diartikan keluar atau pergi meninggalkan ajaran Islam. Dan dalam hal ini *riddah* merupakan suatu perbuatan yang sangat dilaknat oleh Allah SWT. Karena mengingkari dari kebenaran agama Islam setelah menjadi seorang yang beragama Islam. Dalam hal *riddah* Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 217:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة/٢: ٢١٧)¹⁸

Artinya: "Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Baqarah:217)

Orang yang murtad baik laki-laki maupun perempuan wajib disuruh untuk bertaubat, karena hak kelanjutan hidupnya masih terjaga lantaran keIslaman dan kemungkinan mengalami *kesyubhatan* pada dirinya. Kemudian apabila tidak mau bertaubat maka hakim wajib membunuhnya dengan memenggal kepalanya bukan dengan cara lain, dengan tanpa diberi kesempatan waktu lagi, maksudnya perintah taubat dan pembunuhan berlangsung dengan seketika sebagai dasar hadits Rasulullah SAW riwayat Imam Al-Bukhari:

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ¹⁹

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhu Islam waa Adillatuhu*, (Daar Fikr: Damaskus, 1989), h. 183

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma exagrafika, 2009), h.

“Barangsiapa mengganti agamanya maka bunuhlah dia”

Apabila si orang yang *murtad* mau bertaubat kembali kepada Islam maka Islamnya sah dan diurungkan pembunuhan itu kepadanya sekalipun berkali-kali berbuat murtad.²⁰

H. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah menyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.²¹ Dalam hal ini hipotesis dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan belum didasarkan terhadap fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Penulis menelaah bahwa sanksi *Assahir* (santet) adalah hanya sanksi *Riddah* (Sanksi Murtad), sehingga untuk memastikan hal tersebut penulis akan meneliti lebih mendalam tentang Sanksi Hukum *Assahir* dalam Hukum Pidana Islam.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif atau *library research*. Yaitu penelitian yang menggunakan buku sebagai bahan literatur dan referensi penulis yang didapatkan dari beberapa sumber buku yang terkait dengan penelitian ini.²² Adapun penelitian ini adalah penelitian

¹⁹ Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya, Mutiara Ilmu, 2012), h. 560

²⁰ Zainuddin Abdul Aziz al-Maliabari, *Fathul Mu'in bi Syarh Quratul 'Ain*, (Indonesia: Haramain, 2006), h. 128

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung, Alfa Beta, 2016), h. 64

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), h. 149.

perpustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dipustaka dan menggunakan bahan-bahan bacaan berupa buku, majalah atau lainnya.²³Tujuan umum penelitian ini adalah mengklasifikasi serta menelaah bentuk kajian terdahulu agar lebih mudah difahami oleh seluruh kalangan sehingga hasil penelitian ini nantinya bisa membenarkan teori (pendapat) yang telah ada, dan lebih memudahkan lagi orang-orang untuk lebih cepat faham. Penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan masalah yang diteliti secara apa adanya, atau disebut *deskriptif*.

2. Pendekatan penelitian

Nilai suatu ilmiah dalam suatu penelitian sangat tergantung dari cara pendekatan yang digunakan, jika tidak tepat maka bobot penelitiannya tidak akurat. Penelitian ini digunakan berdasarkan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual adalah jenis pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum yang dilihat dari konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya atau dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan. penelitian kualitatif disebut juga dengan penelitian *naturalistik* karena penelitiannya dilakukakan dengan kondisi yang alamiyah (*natural setting*) disebut juga metode *ethnographi*, karena pada awalnya metode ini lebih banyak dilakukan dalam penelitian bidang antropologi, disebut sebagai kualitatif dikarenakan data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifar

²³Sukiati, *Metodologi Penelitian sebuah Pengantar*, (Medan : Perdana Publishing, 2017), h.48

kualitatif.²⁴ pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁵

3. Sumber data

Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik selama penelitian berlangsung.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (langsung dari sumbernya). Sumber ini langsung berkaitan dengan keperluan penelitian demi tercapainya tujuan penelitian. Sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab *Tayri' al-Jinai al-Islami* yang disusun oleh Abdul Qadir Audah, *al-Ahkam Shulthaniah* yang di karang oleh Abu Hasan al-mawardi, Al-Qur'an, Kitab- kitab Hadits, *Tafsir-Tafsir Ahkam*, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan buku-buku Hukum primer lainnya.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari beberapa kitab yang ditulis oleh fuqaha lain dan ahli-ahli hukum lainnya yang dapat dapat dijadikan pelengkap isi penelitian ini, bukan berasal dari sumber primer.

c. Data Tersier

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. h. 64

²⁵ Sukiati, *Metodologi Penelitian sebuah Pengantar. Ibid.*, h. 83.

Adapun yang dijadikan bahan hukum tersier dalam penyelesaian skripsi ini agar lebih bagus ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder seperti kamus dan *ensiklopedia*.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data tertulis yang telah menjadi dokumen.

e. Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif. Teknik analisis data deskriptif kualitatif merupakan metode untuk memaparkan, menafsirkan serta menguraikan data yang bersifat kualitatif yang diperoleh dari hasil penelaahan pustaka. Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis nonstatistik, yaitu mengambil keputusan atau kesimpulan-kesimpulan yang benar melalui proses pengumpulan, dan penganalisaan data hasil penelitian, kemudian menyajikannya dalam karya ilmiah²⁶.

J. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Agar dapat dipahami permasalahannya lebih sistematis maka penelitian ini akan dibagi kepada beberapa bab, yang masing-masing berisi sub-bab, yaitu:

²⁶ Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 27

Bab I, bab ini berisi tentang pendahuluan terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Hipotesa, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab II, merupakan tinjauan umum seputar pengertian tindak pidana (jarimah) Riddah dalam pandangan hukum pidana Islam

Bab III bab ini berisi tentang Pembuktian Tindak Pidana santet (*as-sahir*) dalam hukum pidana Islam dan RUU KUHP versi pemerintah

Bab IV, merupakan Analisis Sanksi pelaku santet dalam hukum pidana Islam dan RUU KUHP versi pemerintah.

Bab V, Merupakan Penutup, yang terdiri atas Kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AS-SAHIR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Tindak Pidana *As-sahir*

Suatu hal yang tak nampak atau astral biasa kita kenal dengan istilah ghaib. Sesuatu yang keberadaannya ghaib tidaklah selalu negatif, seperti mukjizat, karomah, dan maunah. Mukjizat menurut syekh Muhammad Zain al-Asyiy ialah suatu peristiwa yang menyalahi adat (luar biasa) terjadi pada rasul tidak dapat ditandingi siapapun juga yang diberikan Allah terhadap mereka (para nabi dan rasul).²⁷

Sedangkan *Karomah* ialah sesuatu yang dipahami untuk kepentingan yang ditunjukkan Allah kepada manusia, keajaiban karomah ini dianugerahkan sebagai hadiah dari Allah untuk manusia lewat seorang Wali (orang sholih dan taat).²⁸ Maunah ialah perkara-perkara luar biasa yang diberikan Allah kepada manusia biasa dan merupakan pertolongan khusus yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya.²⁹ Hal ghaib yang bersifat negatif ialah hal ghaib yang dilakukan dengan mendekatkan diri kepada syetan dan dengan pertolongan darinya, hal ghaib tersebut berupa sihir.

Di Indonesia sihir dikenal dengan bermacam-macam istilah yaitu seperti santet, teluh, ataupun guna-guna. Santet adalah salah satu praktik sihir yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang bertujuan untuk mencelakaikan orang lain seperti penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang

²⁷ Muhammad Zain bin Faqih Jalaluddin al-Asyiy, *Bidayatul Hidayah fi syarh Umm al-Barahin*, (Medan: Pustaka Asyirah Aswaja, 2019), h. 84

²⁸ Muhammad Iqbal. *Ensiklopedi Ringkas Tentang Islam*. (Jakarta: Taramedia, 2003), h.225

²⁹ M. Abdul Mujieb, dkk. *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 204

yang dikehendaknya,³⁰ oleh karenanya santet dapat dikategorikan sebagai salah satu dari golongan sihir. Secara bahasa, *As-sahir* adalah *isim fa'il* berasal dari kata bahasa Arab yang diambil dari kata *sahara'* (سَحَرَ) yang berarti Pelaku Sihir/Dukun.³¹ Sedangkan menurut Al Azhari, sihir ialah amal perbuatan yang dilakukan dengan mendekatkan diri kepada syetan dan dengan pertolongan darinya. Menurut al-Azhari arti kata sihir ialah memalingkan sesuatu dari hakekatnya kepada selainnya seolah-olah penyihir melihat kebatilan dalam bentuk kebenaran dan membayangkan sesuatu tidak menurut sebenarnya.³²

Assahir (Santet) dalam Islam dikenal dengan istilah sihir sedangkan pengertian sihir sendiri yaitu:

هو ما يفعله الساحر من الحيل والتخيلا، التي تحصل بسببها للمسحور ما يحصل من الخواطر الفاسدة الشبيهة بما يقع لمن يرى فيظنه ما³³

Artinya: “Sihir adalah sesuatu yang dikerjakan oleh tukang sihir dari tipu daya (Jin) dan perkara tahayul, dengan cara itu bisa menyebabkan kekhawatiran bagi seseorang yang kena sihir (korban) mengalami cacat seperti apa yang diperkirakan (disugestikan) oleh perbuatan penyihir dengan cara memvisualkan seorang yang dituju dengan media air.”

Menurut Ibnu Qudamah, *sihir* ialah *buhul*, mantra dan perkataan yang diucapkan atau ditulis atau dibuat sesuatu yang berpengaruh pada jasad orang yang disihir atau pada hati dan akal nya tanpa menyentuh secara langsung. Diantaranya dapat menimbulkan kematian, sakit, dan menimbulkan kebencian.³⁴

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwasannya sihir ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan menyediakan syarat-syarat

³⁰Penjelasan RUU KUHP versi pemerintah Pasal 293 ayat 1

³¹Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet XIV, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 615

³²Wahid Abdus Salam Bali, *Sihir Dan Cara Pengobatannya Dalam Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 1995). h. 21

³³Al fara'i, *Fathul Qodir jilid 1*, (Darul Ma'rifat, Beirut Libanon, tt), h. 240

³⁴Ibid., h. 22

tertentu, dibawah kondisi-kondisi dan persiapan-persiapan yang tidak wajar, dan dengan cara misterius. Hal itu dilakukan guna mempengaruhi seseorang atau sejumlah orang, untuk mencapai maksud-maksud tertentu yang diinginkan baik itu secara pribadi atau orang yang memintanya.³⁵

B. Dalil-Dalil Hukum Tentang As-Sahir

1. Al-Quran

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمٍ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٌ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانِ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلَّمُوا لِمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي آخِرَةِ مِنَ خَلْقٍ وَلَيْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۚ

Artinya: “Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), Padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir). mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil Yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya Kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir". Maka mereka mempelajari dari kedua Malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah. dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa Barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, Tiadalah baginya Keuntungan di akhirat, dan Amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui. Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, (niscaya mereka akan mendapat pahala), dan Sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik, kalau mereka mengetahui.” (QS. Al Baqarah 102-103).

2. Hadits Nabi

³⁵Muhammad Isa Daud, *Dialog Dengan Jin Muslim*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996). h.

عَنْ جَنْدَبٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبُهُ بِالسَّيْفِ (رواه الترمذي والدرقطني وضعف الترمذي اسناده و قال صحيح عن جندب موقوف)

Artinya: Dari Jandab bersabda Rasulullah SAW hukuman had bagi penyihir adalah dipukul dengan pedang (hadits riwayat Imam Tirmidzi dan Daruquthni, Tirmidzi mendhaifkan sanadnya adapun yang shahih dari Jandab Mauquf).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اجْتَنِبُ السَّبْعَ الْمُؤَبَّاتِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَاهُنَّ؟ الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَ سِحْرٌ، وَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَ أَكْلُ الرِّبَا، وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَ التَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ، وَ قَذْفُ مُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ. رواه البخري

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi SAW, bersabda ia: “jauhilah tujuh hal yang menghancurkan”. Mereka bertanya: “apa itu wahai Rasulullah?”. Nabi SAW bersabda: “Kemusyrikan kepada Allah, Sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari peperangan, menuduh berzina wanita mu'minah”.(HR. Bukhari)

C. Hubungan *As-sahir* dengan *Riddah* (Murtad)

Adapun sihir atau menidurkan secara magnetis merupakan satu ilmu yang benar-benar ada dan tidak bisa dipungkiri. Akan tetapi ilmu itu tidak mampu untuk mempengaruhi Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam* sebab menurut para ulama, ilmu itu hanya mampu mempengaruhi hati orang-orang yang lemah. Ibnu al-Qoyyim berkata: “Mengenal tukang-tukang sihir, sesungguhnya sihir mereka hanya mampu mempengaruhi hati-hati orang yang lemah lagi pemarah (emosional), dan jiwa-jiwa yang suka menuruti keinginan syahwat yakni yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan rendah. Sihir inilah yang mampu mempengaruhi wanita, anak-anak, orang-orang bodoh, penduduk pedalaman (badui) dan orang-orang yang lemah dalam beragama, bertawakkal dan

bertauhid.”³⁶Az-Zurqoni dalam syarahnya menukil perkataan Imam Ar-Raazi demikian: “Pengaruh sihir tidak akan ada kecuali bagi orang-orang fasiq.”³⁷

Santet atau sihir telah terjadi di masa Rasulullah saw. Pada saat itu Rasulullah saw. Mengalami sakit parah, maka datanglah malaikat dan menyampaikan bahwa Rasulullah saw telah terkena sihir yang dibuat oleh Labid binal-asham. Sihir tersebut berup gulungan yang didalamnya terdapat tali yang terdiridari sebelas simpul. Maka berdasarkan riwayat tersebut turunlah al-Qur’an surat Al-Alaq dan An-Nash, setiap Rasulullah saw membaca satu ayat maka terbukalah satu simpulnya.

Maka keesokan harinya, Nabi Muhammad memerintahkan Ammar bin Yasir dan beberapa sahabatnya untuk mendatangi sumur *Dzarwan*. Mereka mendapati bahwa air dalam sumur *Dzarwan* berwarna merah kecokelatan seperti air perasaan daun pacar sementara kepala mayangnya seperti kepala setan. Satu riwayat menyebutkan bahwa gulungan sihir tersebut dibiarkan di dalam sumur. Nabi Muhammad tidak meminta untuk mengangkatnya karena Allah telah menyembuhkannya. Beliau juga tidak suka menyebar keburukan kepada orang banyak. Nabi kemudian meminta agar sumur Dzarwan ditutup. Dari riwayat tersebut nampak bahwasannya santet sudah ada di zaman Rasulullah saw.³⁸Merupakan jenis ilmu sihir untuk mengendalikan suatu kejadian, obyek, orang dan fenomena lainnya secara mistis atau supranatural dengan perantara orang yang ahli dalam bidangnya (paranormal ilmu hitam). Ilmu hitam identik dengan sihir dengan tujuan kearah negatif, karena sifatnya yang mencelakakan

³⁶Ibnu al-Qoyyim, *Za’dul Ma’ad*, Juz V, (Daarul Ma’rifah: Beirut, 1993), h. 386

³⁷Muhammad ibn Abdul Baaqi Az-Zurqoni, *Al-Mawaahibul Laduniyyah*, Juz VII, (Al-Azhaariyyah AL-Mishriyyah, 1327 H), h. 104

³⁸Ibnu Sa’ad, *Ath-Thobaqoot al-Kubro*, jilid II, (Daarun Shaadir, Beirut, 1957), h. 196-199

bahkan dapat membahayakan nyawa orang lain.³⁹Ritual sihir biasanya dilakukan apabila ada kesepakatan antara pelaku sihir dengan pesuruh (biasanya orang yang memiliki problem tertentu) dengan bantuan Jin untuk melakukan keharaman lalu pelaku sihir member imbalan berupa memberi pertolongan kepada Jin tersebut supaya taat untuk melakukan apa saja yang dimintanya, menurut beberapa narasumber langkah-langkah menyantet yaitu:

- 1) Tukang sihir akan memulai membaca mantra yang berbau kesyirikan misalnya mengagungkan para pembesar Jin dan meminta bantuan mereka dan berikrar bersekutu kepadanya dengan menyembah selain dari Allah *subhanahu wata'ala*;
- 2) Tukang sihir akan membawa kerbau, burung, ayam, merpati, atau yang lainnya sesuai ciri-ciri tertentu sesuai dengan permintaan Jin, biasanya yang berwarna hitam pekat. Kemudian membelihnya tanpa lafadz Allah, lalu membuangnya ketempat-tempat kosong seperti sumur, danau, puing-puing bangunan;
- 3) Sihir memiliki syarat-syarat untuk bisa bertemu Jin yang akan disuruhnya, Menurut Abu Iqbal (Ketua Komunitas Cinta Ruqyah Semarang) salah satunya dengan penistaan Al qur'an, contohnya dengan media mushaf yang dipakai selayaknya alas kaki, lalu masuk dalam tempat-tempat najis, menulis mushaf dengan darah haid dan menyembah bintang, kesemua cara itu umum digunakan di masyarakat Jawa Tengah, sedangkan daerah lain memiliki ritual-ritual tersendiri namun pada intinya sama.⁴⁰

Maka dengan latar belakang tersebut demikian perbuatan sihir dapat dikaitkan dengan *jarimah hudud riddah* (tindak pidana murtad) karena dalam proposrsi dari kegiatan perbuatan sihir/santet tersebut mengandung aspek yang dapat merusak aqidah keimanan yang menjerumuskan kepada kekufuran maka dalam hal ini *riddah* difahami sebagai berikut:

Riddah adalah kembali/keluar dari agama Islam dengan cara meninggalkan agama Islam atau meninggalkan kebenaran dari agama Islam.

³⁹Ketut Nihan Pundari, *Eksistensi Kejahatan Magis dalam Hukum Pidana*, (Jurnal Fakultas Hukum Univ. Udayana, tt). h. 17

⁴⁰Budiono Herusatto, *Konsepsi Spiritual Leluhur Jawa*, (Ombak, Yogyakarta, 2009), h. 63

وَهِيَ شَرْعًا الرَّجْعُ عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ إِلَى الْكُفْرِ سَوَاءً بِنِيَّةٍ أَوْ بِفِعْلِ الْمُكَفِّرِ أَوْ
بِقَوْلٍ⁴¹

Artinya: “Sedangkan menurut syara’ *riddah* merupakan kembali kepada kekafiran, baik dengan niat, perbuatan yang menyebabkan kekafiran, atau dengan ucapan”.

Dari definisi tersebut *riddah* diartikan keluar atau pergi meninggalkan ajaran Islam. Dan dalam hal ini *riddah* merupakan suatu perbuatan yang sangat dilaknat oleh Allah SWT. Karena mengingkari dari kebenaran agama Islam setelah menjadi seorang yang beragama Islam. Dalam hal *riddah* Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 217:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة/٢: ٢١٧)

Artinya: “Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”(QS. Al-Baqarah:217)

Di dalam hukum Islam, pelaku sihir atau santet tidak disebutkan secara jelas bentuk hukumannya baik dalam Al-Quran dan Hadis. Namun adapun hukum melakukan sihiratau menyantet terhadap orang lain ialah kafir. Berikut dalil mengenai ke kafiran tukang sihir Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 102.

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ
الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا

Artinya: “Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir).”

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 119

Orang yang murtad baik laki-laki maupun perempuan wajib disuruh untuk bertaubat, karena hak kelanjutan hidupnya masih terjaga lantaran keIslaman dan kemungkinan mengalami *kesyubhatan* pada dirinya. Kemudian apabila tidak mau bertaubat maka hakim wajib membunuhnya dengan memenggal kepalanya bukan dengan cara lain, dengan tanpa diberi kesempatan waktu lagi, maksudnya perintah taubat dan pembunuhan berlangsung dengan seketika sebagai dasar hadits Rasulullah saw riwayat Imam Al-Bukhari.

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ⁴²

“Barangsiapa mengganti agamanya maka bunuhlah dia”

Apabila si orang yang murtad mau bertaubat kembali kepada Islam maka Islamnya sah dan diurungkan pembunuhan itu kepadanya sekalipun berkali-kali berbuat murtad.⁴³

⁴² Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya, Mutiara Ilmu, 2012), h. 560

⁴³ Zainuddin Abdul Aziz al-Maliabari, *Fathul Mu'in bi Syarh Quratul 'Ain*, (Indonesia: Haramain, 2006), h. 128

BAB III

AS-SAHIR DAN PEMBUKTIANNYA MENURUT HUKUM

PIDANA ISLAM DAN RUU KUHP

A. Pembuktian As-Sahir Menurut Hukum Pidana Islam

Untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana diperlukan adanya pembuktian, pembuktian dalam hukum Islam harus berdasarkan alat bukti yang sah dan meyakinkan. Alat bukti ialah alat untuk menjadikan pegangan hakim sebagai dasar untuk memutuskan suatu perkara. Dengan demikian, alat bukti adalah suatu upaya yang dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim di muka pengadilan dan dipergunakan oleh hakim untuk memutuskan suatu perkara, sehingga alat bukti diperlukan oleh pencari keadilan maupun pengadilan. Menurut hukum Islam alat bukti dalam peradilan pidana terdiri atas:

1. *Iqrar* (Pengakuan);
2. *Syahadah* (Persaksian);
3. *Al-qasamah* (sumpah); dan
4. *Qarinah* (Petunjuk).⁴⁴

Ketiga alat bukti tersebut selain *qasamah* (pengakuan, persaksian, dan *qarinah*) merupakan alat bukti yang banyak digunakan dalam *jarimah-jarimah hudud*. Perbedaan pendapat antara para ulama tersebut, hanya dalam alat bukti yang keempat, yaitu *qarinah*. Dalam uraian di bawah ini, penulis akan menguraikan keempat jenis alat bukti tersebut, meskipun alat bukti yang paling kuat sebenarnya hanya dua, yaitu pengakuan dan persaksian. *Qasamah* sendiri

⁴⁴Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamy*, Juz II, (Dar Al-Kitab Al-A'rabi: Beirut, tanpa tahun), h. 303.

juga termasuk alat bukti yang diperselisihkan, walaupun ulama-ulama dari kalangan mazhab yang empat telah menyepakatinya.

a. Pengakuan

Pengakuan (*al-iqrar*) menurut Bahasa adalah penetapan. Sedangkan menurut *syara'*, pengakuan didefinisikan sebagai berikut

الْإِقْرَارُ....شَرْعًا هُوَ الْإِخْبَارُ عَنْ حَقٍّ أَوْ اعْتِرَافٍ بِهِ⁴⁵

Artinya: “Pengakuan menurut *syara'* adalah suatu pernyataan yang menceritakan tentang suatu kebenaran atau mengakui kebenaran tersebut.”

Dasar hukum tentang *Iqrar* (pengakuan) ini terdapat dalam Al-quran, Sunnah dan *Ijma'*. Adapun sumber dari Al-quran yaitu:

1. Surah An-Nisa ayat 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ⁴⁶

Artinya: ”Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu...(Q.S An-Nisa: 135).

Penyaksian seseorang atas dirinya sendiri ditafsirkan sebagai suatu pengakuan atas perbuatan yang dilakukannya.

2. Surah Al-Imran ayat 81

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَفَرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ⁴⁷

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), h. 68

⁴⁶ T.M Hasbi As-Shiddiqi, dkk, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Mujamma' Khadim Al-Haramain Asy Syarifain, Madinah, 1971), h. 144.

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 47

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian dari para Nabi: “sungguh apa saja yang Aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah...”, Allah berfirman: “Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianKu terhadap yang demikian itu?” mereka menjawab: “kami mengakui.” Allah berfirman: “kalua begitu saksikanlah (hai para Nabi)dan Aku menjadi saksi (pula) bersama kamu.” (Q.S Al-Imran: 81)

Sumber hukum dari sunah terdapat di dalam hadis Ma’iz yang datang kepada Nabi mengakui perbuatannya, dan hadis tentang kisah Al-‘Asif, dan ini sudah dijelaskan panjang lebar dalam bab zina. Dlam hadis Al-Asif Nabi bersabda:⁴⁸

...وَأَعِدِّيَا نَيْسٍ لِرَجُلٍ مِّنْ أَسْتَمَ إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَإِنَّ اعْتَرَفْتَ فَارْجَمْهَا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“...Dan pergilah kamu hai Unais untuk memeriksa istrinya laki-laki ini, apabila ia mengaku (berzina) maka rajamlah dia”. (Mutafaq alaih).

Di samping Al-quran dan Sunah, para ulama bahkan semua umat Islam telah sepakat tentang keabsahan pengakuan merupakan suatu pernyataan yang dapat menghilangkan keraguan dari orang yang menyatakan pengakuan tersebut. Alasan lain adalah bahwa seseorang yang berakal sehat tidak akan melakukan kebohongan yang akibatnya dapat merugikan dirinya. Karena itu pengakuan lebih kuat daripada persaksian, dan dapat digunakan sebagai alat bukti untuk semua jenis tindak pidana. Pengakuan yang dapat diterima sebagai alat bukti adalah pengakuan yang jelas, terperinci, dan pasti sehingga tidak bias ditafsirkan lain kecuali perbuatan pidana yang dilakukannya. Di samping itu, syarat yang lain untuk sahnya pengakuan adalah bahwa pengakuan harus benar dan tidak dipaksa (terpaksa). Pengakuan yang demikian harus timbul dari orang yang berakal dan mempunyai kebebasan (pilihan). Dengan demikian, pengakuan yang datang dari

⁴⁸Muhammad Ibn Ali Asy-Syaukani, *Nail Al- Authar*, Juz VII, (Dar Al-Fikr, tanpa tahun), h. 249.

orang gila atau hilang akal, dan yang dipaksa hukumnya tidak sah dan tidak dapat diterima.

b. Saksi

Pengertian persaksian, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili adalah sebagai berikut:

وَهِيَ اخْبَرٌ صَادِقٌ لِاثْبَاتٍ حَقٍّ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ

“Persaksian adalah suatu pemberitahuan (pernyataan) yang benar untuk membuktikan suatu kebenaran dengan lafaz syahadat di depan pengadilan”.⁴⁹

Penggunaan saksi sebagai alat pembuktian untuk suatu *jarimah* merupakan cara yang lazim dan umum. Karenanya persaksian merupakan cara pembuktian yang sangat penting dalam mengungkap suatu *jarimah*.⁵⁰ Dasar hukum untuk persaksian sebagai alat bukti terdapat dalam Al- Quran dan Sunah. Dalam Al- Quran antara lain tercantum dalam:

1. Surah Al- Baqarah ayat 282

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

“..Dan persaksiakanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki maka (boleh) seorang lelaki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai supaya jika seorang lupa, seorang lagi mengingatkanannya.” (Q.S Al- Baaqarah:282).⁵¹

⁴⁹Wahbah Zuhaili, *Al- Fiqh Al- Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, (Dar Al- Fikr, Damaskus, 1989), h. 388.

⁵⁰M Hasbi As-Shiddiqi, dkk, *Al-quran dan Terjemahnya*, h. 70

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 37

2. Surah an-Nisa ayat 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ...

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah...”

3. Surah At-Thalaq ayat 2

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah” (Q.S.At-Thalaq: 2).⁵²

Para fuqaha secara umum juga membolehkan pembuktian dengan seorang saksi laki-laki atau seorang perempuan dalam keadaan darurat, baik untuk membuktikan substansi tindak pidana itu sendiri atau pengaruh dan akibat tidak pidana tersebut. Pada akhirnya, kunci untuk diterimanya kesaksian adalah adanya keyakinan hakim.

Apabila keterangan saksi tidak seragam, atau bahkan bertentangan antara saksi yang satu dengan saksi yang lain maka kesaksian yang demikian tentu saja meragukan dan hakim sebagai pengambil keputusan tentu tidak yakin dan menolak kesaksian tersebut.

c. Qasamah

Qasamah dalam arti Bahasa adalah

1. (الحسن والجمال) Yang artinya bagus dan indah
2. (اليمن). Yang artinya sumpah.⁵³

Menurut arti istilah, *qasamah* didefinisikan sebagai berikut:

وَالْمَرَدُّ بِٱلْقَسَامَةِ هَهُنَا ٱلْإِيمَانُ الْمُكْرَّرَةُ فِى دَعْوَى ٱلْقَتْلِ

⁵²*Ibid.*, h. 445

⁵³Ibrahim Unais, *Al- Mu'jam Al-Wasith*, Juz II, (Dar Ihya' At-Turats Al-Arabi, t.t), h. 735.

Artinya: “Adapun yang dimaksud dengan *qasamah* di sini adalah sumpah yang diulang-ulang dalam dakwaan (tuntutan) pembunuhan”.⁵⁴ Hanafiyah mendefinisikan *qasamah* sebagai berikut:

فِي عَرَفَ الشَّرْعَ تَسْتَعْمَلُ فِي الْيَمِينِ بِاللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِسَبَبِ مَخْصُوصٍ وَعَدَدٍ مَخْصُوصٍ وَعَلَى شَخْصٍ مَخْصُوصٍ وَهُوَ الْمَدْعَى عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Menurut istilah *syara qasamah* digunakan untuk arti sumpah dengan nama Allah SWT karena adanya sebab tertentu, dengan bilangan tertentu, untuk orang tertentu yaitu si terdakwa dan menurut cara tertentu”.⁵⁵

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *qasamah* adalah sumpah yang diulang-ulang. Hanya saja siapa yang bersumpah masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiyah, sumpah dilakukan oleh penduduk tempat ditemukannya korban, sedangkan jumhur ulama menyatakan sumpah dilakukan oleh keluarga korban. Atas dasar itu, Abdul Qadir Audah dan juga Wahbah Zuhaili membuat definisi yang merangkum kedua pendapat tersebut dengan mengatakan:

Arti *qasamah* menurut istilah para fuqaha adalah sumpah yang diulang-ulang di dalam dakwaan (tuntutan). Sumpah yang akan dituntut oleh Allah adalah sumpah dengan menggunakan nama Allah secara sengaja lagi bertujuan menyakinkan pihak *kalin*. Pertanggungjawaban yang dituntut-Nya itu dapat berbentuk kewajiban memenuhinya, atau bila tidak memenuhinya, maka kewajiban membayar *kaffarat*, yakni imbalan tertentu berupa puasa atau member makan fakir miskin. Kalau tidak, maka yang bersangkutan terancam dijatuhi hukuman di hari Kemudian. Adapun terhadap penolakan sumpah dan

⁵⁴ Abdullah Ibn Qudamah Al- Maqdisi, *Al-Mughni*, Juz VII, (Dar Al- Manar, 1368), h. 64.

⁵⁵ Ala Ad-Din Al-Kasani, *Kitab Bada' Ash- Shana'I Fi Tartib Asy-Syara'i*, (Dar Al-Fikr:Beirut, 1996), h. 422.

mengembalikan sumpah kepada penggugat. Ada suatu hadits yang diriwayatkan oleh Daruquthni dari Nafi' Ibnu Umar bahwa Nabi saw. pernah meminta kepada penggugat untuk bersumpah. Hadist tersebut berbunyi sebagai berikut:

عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى طَالِبِ الْحَقِّ⁵⁶

Artinya: "Dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. pernah mengembalikan sumpah kepada penggugat hak. "(HR.ad-Daruquthni).

d. *Qarinah*

Seperti telah dikemukakan bahwa *qarinah* merupakan alat bukti yang diperselisihkan oleh para ulama untuk tindak pidana qazaf. Pengertian *qarinah* menurut Wahbah Zuhaili adalah sebagai berikut.

الْقَرِينُ هِيَ كُلُّ أَمَارَةٍ ظَاهِرَةٍ تَقَارَنُ شَيْئًا خَفِيًّا، فَتَدُلُّ عَلَيْهِ⁵⁷

Artinya: “*Qarinah* adalah setiap tanda (petunjuk) yang jelas yang menyertai sesuatu yang samar, sehingga tanda tersebut menunjukkan kepadanya”.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa untuk terwujudnya suatu *qarinah* harus dipenuhi 2 hal, yaitu:

1. Terdapat suatu keadaan yang jelas dan diketahui yang layak untuk dijadikan dasar dan pegangan;
2. Terdapat hubungan yang menunjukkan adanya keterkaitan antara keadaan yang jelas (*zhahir*) dan yang samar (*khafi*).

Jumhur fuqaha membatasi penggunaan *qarinah* ini dalam kasus-kasus yang ada nashnya, seperti *qasamah*. Sedangkan para Fuqaha yang berpendapat bahwa *qasamah* merupakan alat bukti, seperti Ibn Al-Qayyim memberikan argumentasi, bahwa apabila *qarinah* tidak digunakan, akan banyak sekali hak-hak

⁵⁶ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 34-36

⁵⁷ Wahbah Zuhaili, *Al- Fiqh Al- Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, h. 391.

yang hilang dan tercecer, dan ini merupakan suatu kezhaliman. Dari beberapa jenis alat bukti tersebut, memang tidak ditemukan secara jelas dalam nash mengenai pembuktian terhadap sihir atau santet. Tetapi mengenai cara pembuktiannya para fuqaha memiliki argument tersendiri diantaranya ialah, menurut madzhab Maliki pembuktiannya dengan 2 (dua) cara yaitu dengan memakai bukti (*bayyinah*) atau pengakuan dari pelakunya (*iqrar*), sedangkan menurut madzhab Syafi'i pembuktiannya hanya bisa dilakukan dengan cara pengakuan dari pelakunya, sebab tujuan pelaku dan pengaruh dari santet adalah sesuatu yang tak dapat dilihat secara langsung,⁵⁸ sedangkan menurut ulama Indonesia, tindak pidana sihir hanya bisa dibuktikan dengan *iqrar* (pengakuan) atau *yamin mardudah* (sumpah balik), dan ikrar dari penyihir, apabila belum jelas apakah media sihir yang digunakan tersebut bisa melukai atau mematikan orang lain, maka efek media ini bisa ditentukan dengan persaksian 2 orang saksi ahli dari mantan tukang sihir yang telah bertaubat.⁵⁹

B. Pembuktian As-Sahir Menurut RUU KUHP Versi Pemerintah

Pembuktian merupakan alat bukti yang dijadikan pegangan hakim sebagai dasar memutuskan suatu perkara, sehingga dengan berpegang kepada alat bukti tersebut dapat mengakhiri sengketa diantara pihak yang berperkara. Tujuan dari sistem pembuktian adalah untuk mengetahui bagaimana cara memberikan hasil pembuktian terhadap perkara pidana yang sedang dalam pemeriksaan. Sistem pembuktian berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dapat diketahui dari ketentuan hakim sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 183 KUHP, yakni kesalahan terdakwa harus berdasarkan kesalahan yang terbukti

⁵⁸ Muhammad ibn Abdul Baaqi Az-Zurqoni, *Muhtashor Kholil ala syarh Al-Mawaahibul Laduniyyah*, Juz VIII, (Al-Azhaariyyah AL-Mishriyyah, 1327 H), h. 29

⁵⁹ Jalaluddin As-Suyuthi, *al-Ashbah wa Nadzhair*, (Surabaya: Haramain, tt), h. 73

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya.⁶⁰ Mengenai alat bukti diatur dalam KUHP Pasal 184 yakni, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Perihal tindak pidana santet yang di rumuskan dalam pasal 293 RUU KUHP versi Pemerintah, delik tersebut di masukkan kedalam bab V mengenai kejahatan terhadap ketertiban umum. Dilihat dari pembedaan delik kedalam delik formal dan delik materil, delik santet tergolong delik formal yang menekankan kepada dilarangnya perbuatan, bukan menekankan pada dilarangnya akibat dari perbuatan. Pembuktian delik santet tidak harus membuktikan apakah benar kematian seseorang atau hilangnya barang seseorang sebagai akibat santet atau bukan. Yang dilarang dalam hal ini adalah segala perbuatan dan perilaku yang menimbulkan kepercayaan kepada masyarakat akan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat yang diinginkan melalui kekuatan ghaib. Mengutip pendapat Chairul Huda, salah seorang anggota Tim Perumus KUHP dalam situs hukum online, delik santet mendekati pada delik penipuan, yaitu mengaku memiliki kemampuan santet dan menyebarkanluaskannya. Pasal ini dikenakan bagi pelaku delik yang melakukan tindakannya secara sporadis dan berkelanjutan yang dilakukan dengan kontinuitas dan bertujuan mencari keuntungan (mata pencaharian).⁶¹

⁶⁰ Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012) h. 54

⁶¹ *Ibid.*, h. 73

BAB IV

SANKSI BAGI PELAKU AS-SAHIR DALAM HUKUM

PIDANA ISLAM DAN RUUKUHP

A. Sanksi Pelaku *Assahir* Dalam Hukum Pidana Islam

Saksi terhadap pelaku sihir/santet bahwasannnya Al-Quran dan as-Sunnah jelas menyebutkan hukum melakukan sihir ialah kafir. Adapun mengenai hukumannya terhadap pelaku sihir para jumhur ulama berbeda pendapat dalam segihukumannya. Berikut pendapat para ulama mengenai hukuman pelaku. Dalam menentukan saksi hukuman Tukang Sihir dalam Syari'at Islam terdapat bermacam-macam pendapat ulama dan dengan alasan dalil tertentu. Maka dalam memaparkan hukum/ sanksi tentang sihir, penulis mengutip pendapat yang disampaikan oleh Wahid Abdus Salam, yang menyatakan bahwa, hukuman bagi pelaku santet menurut para fuqaha adalah sebagai berikut :⁶²

1. Imam Malik Bin Anas Rahimahullah.

Menurut Imam Malik Bina Anas, tukang sihir yang mengerjakan sihir padahal orang lain tidak mengerjakannya adalah seperti orang, sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 102.

...وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي آٰلِ آٰخِرَةٍ مِنْ خَلْقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۚ

Artinya: "...dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa Barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, Tiadalah baginya Keuntungan di akhirat, dan Amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui. Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, (niscaya mereka akan

⁶²Wahid Abdus Salam Bali, *Sihir Dan Cara Pengobatannya Dalam Islam*. (Jakarta: Robbani Press, 1995). h. 63.

mendapat pahala), dan Sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik, kalau mereka mengetahui.”

Maka, berdasarkan hal tersebut menurut Imam Malik, tukang sihir tersebut harus dibunuh apabila dia sendiri mengerjakannya;

2. Ibnu Qudamah Rahimahullah.

Menurut Ibnu Qudamah, hukuman tukang sihir ialah dibunuh. Hal ini diriwayatkan dari Umar, Utsman Bin Affan, Ibnu Umar, Hafshah, Jundab Bin Abdullah, Abu Hanifah;

3. Al Qurthubi Rahimahullah.

Menurut beliau, para ahli fikih berbeda pendapat tentang hukum sihir muslim dan dzimmi. Malik berpendapat bahwa seorang muslim apabila mensihir sendiri dengan suatu ucapan yang berwujud kekafiran maka beliau dibunuh, tidak diminta taubatnya, dan taubatnya tidak diterima karena beliau adalah perkara yang dilakukannya dengan senang hati seperti orang zindiq dan berzina. Juga karena Allah menamakan sihir dengan kekafiran dalam firman-Nya:

وَمَا يُعْلِمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ

Artinya: “...sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan:” sesungguhnya kami hanyalah (membawa) cobaan (fitnah), sebab itu janganlah kamu ingkar..” (Q.S. Al Baqarah:2:102).

Ini adalah pendapat Ahmad bin Hambal, Abu Tsaur, Ishaq, Syafi’i, dan Abu Hanifah;⁶³

⁶³Diriwayatkan oleh Bukhari juz 5/393 (Fathul Bari syarah Shahih Bukhari Imam Ibn Hajar al-Aqalani) dan Imam Muslim juz 2/83 (Syarah shahih Muslim Imam Nawawi), yang dikutip oleh Syaikh Wahid Abus Salam Bali, *Sihir Dan Cara Pengobatannya Dalam Islam*. h 35

4. Ibnu Mundzir Rahimahullah.

Menurut Ibnu Mundzir, apabila seseorang mengakui bahwa Ia telah mensihir dengan ucapan yang berupa kekafiran maka Ia wajib di bunuh, jika dia tidak bertaubat. Demikian pula jika terbukti melakukannya dan bukti itu menyebutkan ucapan yang berupa kekafiran. Jika ucapan yang dipakai untuk menyihir bukan berupa kekafiran maka Ia tidak boleh dibunuh. Jika dia menimbulkan kriminalitas pada diri orang yang tersihir maka wajib di qisas. Ia di qisas jika sengaja melakukannya. Jika termasuk yang tidak dikenakan *qishas* maka dikenakan *diyat*.⁶⁴

Adapun Hukum Tukang Sihir *Ahlul Kitab* juga terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulam fiqih yakni diantaranya:

1. Abu Hanifah Rahimahullah.

Menurut Abu Hanifah, tukang sihir ahlul kitab dapat dibunuh karena keumuman *khavar* (riwayat), disamping karena sihir merupakan *kriminalitas* (*jinaayat*) yang mewajibkan hukum bunuh terhadap muslim (yang melakukannya) karena itu orang *dzimmi*⁶⁵ pun wajib dikenakan hukum bunuh yang sama;⁶⁶

2. Malik Bin Anas Rahimahullah.

Menurut Malik Bina Anas, tukang sihir *ahlul kitab* tidak dibunuh kecuali jika dia membunuh dengan sihirnya. Ia juga berkata: jika dengan sihirnya dia menimbulkan bahaya terhadap seseorang muslim yang tidak terikat perjanjian

⁶⁴Wahid Abdus Salam Bali, *Sihir Dan Cara Pengobatannya Dalam Islam*. (Jakarta: Robbani Press, 1995). h. 64.

⁶⁵Kafir Dzimmi yakni orang kafir yang tinggal di Negeri Muslim, memiliki perjanjian (damai) dengan kaum Muslimin, membayar pajak (jizyah/ uang keamanan/ upeti sebagai kompensasi pemerintah Islam terhadap harta dan darahnya/ jiwanya. Ketika mereka tidak mampu membayar jizyah, maka jizyah tersebut dapat digugurkan darinya) kepada pemerintah Islam dan ditegakkan kepada mereka hukum-hukum Islam. Lihat., Imam al-Mawardi, *Ahkam As-Shulthoniah*, (Indonesia:Haromain, 2015), h. 158.

⁶⁶Wahid Abdus Salam Bali, *Sihir Dan Cara Pengobatannya Dalam Islam*, h. 65

dengannya sekalipun maka batallah perjanjian dengan perbuatan tersebut lalu dibolehkan membunuhnya. Rasulullah SAW tidak membunuh Labid Bin AlA'sham karena beliau tidak mau membalas untuk dirinya disamping khawatir jika beliau membunuhnya akan terjadi fitnah dikalangan kaum muslimin dandi kalangan sekutunya dari Anshar;⁶⁷

3. Syafi'i Rahimahullah.

Menurut Syafi'i Rahimahullah, tukang sihir Ahlul Kitab tidak dibunuh kecuali jika ia membunuh dengan sihirnya;

4. Ibnu Qudamah Rahimahullah.

Menurut Ibnu Qudamah, tukang sihir Ahlul Kitab tidak dibunuh karena sihirnya kecuali jika ia membunuh dengan sihirnya. Biasanya ia termasuk yang dibunuh karena sihirnya, maka ia dibunuh sebagai qisash, mengingat terbukti bahwa Labid in Al A'sham telah mensihir Rasulullah saw tetapi Rasulullah tidak membunuhnya.⁶⁸

Dari berbagai penjelasan para jumur ulama tersebut kalau di lihat dalam objek kajian *fiqh jinayah* bahwasannya bentuk hukuman terhadap pelaku sihir atau santet (*As-sahir*) dapat dikategorikan kedalam jarimah *ta'zir*. Jarimah *ta'zir* yaitu semua jenistindak pidana yang tidak secara tegas diatur oleh nash (Al-Quran dan hadis). Aturan teknis, jenis, dan pelaksanaannya ditentukan oleh penguasa setempat. Bentuk jarimah ini sangat banyak dan tidak terbatas, sesuai dengan bentuk atau tindakan kejahatan yang dilakukannya.⁶⁹ Bentuk hukumannya meliputi: hukuman mati, hukuman cambuk, hukuman penjara, hukuman pengasingan, dan sebagainya.

⁶⁷ Syaikh Wahid Abdus Salam Bali, *Sihir Dan Cara Pengobatannya Dalam Islam*, h 65

⁶⁸ Ibid.,h. 66

⁶⁹ Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Hamzah, 2013), h. 4

Ta'zir secara bahasa yang berasal dari kata عَزَّرَ yang memiliki persamaan makna yakni مَنَعَ وَرَدَّ yang artinya mencegah menolak, أَدَّبَ yang artinya mendidik, عَظَّمَ وَوَقَّرَ yang artinya mengagungkan dan menghormati, أَعَانَ وَقَوَّى وَنَصَرَ yang artinya membantu, menguatkan, dan menolong. Dari keempat pengertian tersebut, yang paling relevan adalah pengertian pertama مَنَعَ وَرَدَّ (mencegah menolak), dan pengertian kedua التَّأْدِيبُ (mendidik). Pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah⁷⁰ dan Wahbah Zuhaili.⁷¹ *Ta'zir* diartikan مَنَعَ وَرَدَّ (mencegah menolak) karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. *Ta'zir* diartikan mendidik التَّأْدِيبُ (mendidik), karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnyanya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Menurut istilah, *ta'zir* didefensikan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitabnya sebagai berikut.

و تَعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى الذُّنْبِ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ⁷²

Artinya: “*ta'zir* merupakan hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan perbuatan dosa (*jarimah*) yang sanksinya belum ditetapkan terhadap *syara'* (*jarimah hudud*)”.

Sedangkan menurut Ibrahim Unais memberikan *ta'rif* terhadap *ta'zir* menurut *syara'* sebagai berikut:

التَّعْزِيرُ شَرْعًا تَأْدِيبٌ لَا يُبْلَغُ الْحَدَّ الشَّرْعِيَّ

Artinya: “*Ta'zir* adalah sanksi pendidikan yang tidak mencapai sanksi *had syar'i* (yang ditetapkan oleh Allah dalam nash)”

⁷⁰ Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al jinai al-Islamiy juz II*, h. 81

⁷¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqhu al-Islam wa adillatuh juz VI*, h. 197

⁷² Abu Hasan al-Mawardi, *al-Ahkam al-Shulthaniyah wa al-Wilayah al-Diniyah*, (Indonesia : Haramain, 2015), h. 187

Adapun dari beberapa *ta'rif* yang diberikan oleh para ulama diatas, maka jelslah bahwa *ta'zir* merupakan suatu istilah untuk sanksi atas jarimah-jarimah yang tidak ditetapkan hukumannya sebelum ditetapkan oleh *syara'*. Serta dikalangan ulama-ulama fiqih terhadap *jarimah-jarimah* yang belum ditetapkan oleh *syara'* dinamakan *jarimah ta'zir*. Jadi istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah-jarimah tindak pidana.

التَّغْزِيرُ يَدُورُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ⁷³

“sanksi *ta'zir* (berat ringannya) bergantung kepada kemashlahatan”

Dari definisi tersebut juga dapat dipahami bahwa *jarimah ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula *kifarat*. Dengan demikian, inti dari *jarimah ta'zir* adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan perbuatan yang diharamkan (dilarang).

Para fuqaha memberikan contoh meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, meninggalkan sholat *fardhu*, enggan membayar hutang padahal mampu, mengkhianati amanat, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, dan hasil *wakaf*. Sebagai contoh melakukan perbuatan yang dilarang, seperti mencium perempuan lain yang bukan istri, sumpah palsu, penipuan jual beli, *riba*, menyembunyikan pelaku kejahatan dan makan-makanan yang haram. Adapun *ta'zir* berkaitan juga dengan tindak pidana *ta'zir* yang mencakup 3 aspek tindak pidana yakni yang Pertama, *hudud*, dan *qishas* yang di tentukan sanksinya oleh Al-Quran dan hadits tetapi tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman had atau *qishas*, seperti percobaan pencurian, perampokan perzinahaan atau

⁷³ Abdul Azis Amir, *Ta'zir al-Syari'at al-Islam*, (Beirut, Daar al-Fikr Arabi, 1969), h. 55

pembunuhan. Kedua, jarimah-jarimah yang ditentukan oleh al-qur'an dan hadits tetapi tidak dijelaskan sanksinya, namun sanksi tersebut diserahkan kepada *Ulu' al-amri* (pemerintah), seperti jarimah penipuan, perjudian, saksi palsu, dan penghinaan. Ketiga, kejahatan yang ditentukan oleh pemerintah demi kemashlahatan rakyatnya seperti aturan-aturan rambu lalu lintas, dan perlindungan hutan.

Adapun macam-macam penggolongan jarimah ta'zir yakni:

- a. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak

Jarimah ta'zir berkaitan dengan jarimah zina dan menuduh zina (*qadzaf*).

Adapun *jarimah* perzinahan yang diganjar dengan sanksi *ta'zir* adalah perzinahan yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan had, atau terdapat syubhat terhadap pelakunya, perbuatannya atau tempatnya. Demikian lagi dalam jarimah percobaan zina dan perbuatan-perbuatan prazina seperti meraba-raba, *khalwat*, *ikhtilat*, kumpul kebo, berpelukan atau berciuman dengan wanita yang bukan istri, dan lain sebagainya.

Tuduhan zina dalam hal ini yang dikategorikan terhadap sanksi ta'zir adalah terhadap tuduhan kepada orang yang bukan muhsan.⁷⁴ dan termasuk pula tuduhan zina terhadap sekelompok orang tanpa menyebutkan orang tertentu yang dimaksud terhadap tuduhan itu. Demikian lagi terhadap jarimah tuduhan zina dengan cara sindiran (*kinayah*) yang di berisaksi *ta'zir* menurut imam Abu Hanifah

⁷⁴Muhsan menurut para ulama adalah berakal, baligh, Islam, dan iffah (bersif dari segala hal yang menjurus pada maksiat) dari perbuatan zina. Apabila dalam hal ini tidak memenuhi kriteria tersebut maka termasuk ghairu muhsan. Lihat, Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 69

dan bukan *hudud*. Adapun tuduhan-tuduhan selain zina juga diberi sanksi *ta'zir* seperti perbuatan mencacimaki, tuduhan kafir dan lain-lain sebagainya.

b. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemashlahatan individu

Jarimah ta'zir yang termasuk dalam penggolongan *jarimah ta'zir* ini adalah seperti saksi palsu, berbohong (tidak memberikan keterangan yang *valid*) dalam majelis persidangan dipengadilan, melanggar hak *privacy* orang lain seperti masuk kepekarangan rumah orang lain tanpa izin pemiliknya.

c. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemashlahatan umum

Adapun *jarimah* yang termasuk dalam hal ini adalah

- 1) *Jarimah* yang mengancam keamanan dan stabilitas negara seperti percobaan kudeta;
- 2) Suap dan *nepotisme*;
- 3) Tindakan melampaui batas dari pegawai/pejabat pemerintahan kelalaian dalam menjalankan kewajiban. Seperti penolakan hakim menangani suatu perkara, atau kesewenang-weangan hakim dalam memberikan putusan;
- 4) Pelayanan buruk aparatur pemerintah terhadap masyarakat;
- 5) Melawan pemerintah dan pembangkangan terhadap peraturan seperti penghinaan terhadap pengadilan dan melawan polisi;
- 6) Melepaskan narapidana dan menyembunyikan buronan;
- 7) Pemalsuan tanda tangan dan stempel;
- 8) Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi seperti penimbunan bahan pangan sehingga menjadi langka di pasar, kecurangan timbangan serta takaran, dan lain-lain sebagainya.

Sanksi *ta'zir* yang terberat adalah hukuman mati sedangkan yang teringan adalah berupa peringatan. Berat ringannya sanksi *ta'zir* ditentukan oleh kemashlahatan. Dalam hal ini harus dipertimbangkan perbuatan baik kualitas maupun kuantitasnya, pelaku, orang atau masyarakat yang dikorbankan, tempat terjadinya dan waktunya mengapa dan bagaimana si pelaku melakukan kejahatan. Sebagaimana kaidah fiqh berikut:

التَّغَرُّزُ إِلَى الْإِمَامِ عَلَى قَدَرِ عَظَمِ وَصَخَرِهِ

Artinya: “Berat ringannya sanksi *ta'zir* diserahkan kepada *Imam* (hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan”.⁷⁵

Kaidah ini memberikan kewenangan kepada hakim dalam memjatuhkan berat ringannya hukuman yang bisa dijadikan sebagai yurisprudensi. Sudah barang tentu juga dipertimbangkan daya preventif dan represif (*al-radd' wa al-jazr*) dari hukuman tersebut serta dipertimbangkan pula daya *edukatif* dan *rehabilitatif* bagi pelaku jarimah.

B. Sanksi Pelaku Santet Menurut RUU KUHP Versi Pemerintah

Uraian mengenai kasus santet dilatar belakangi fenomena masyarakat dalam mengadili pelaku santet yang cenderung diorientasikan pada tindakan kekerasan dalam menghakimi, maka kriminalisasi santet bertujuan:

1. Mencegah penipuan terhadap masyarakat secara umum yang dapat dilakukan oleh orang yang mengaku memiliki kekuatan gaib yang membantu melakukan perbuatan jahat (dukun palsu);
2. Mencegah masyarakat untuk tidak mencari pihak yang mengaku memiliki kekuatan gaib, untuk melakukan kejahatan;
3. Mencegah masyarakat agar tidak melakukan aksi “main hakim sendiri” (*Eigenrighting*) terhadap orang yang diduga memiliki kekuatan gaib atau terhadap fenomena supranatural.⁷⁶

⁷⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, h. 142

⁷⁶ Loebby Loqman, *Analisis Hukum dan Perundang-Undangan Kejahatan terhadap Keamanan Negara di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1990), h. 17

Tindak Pidana Santet/Sihir disamping KUHP yang terdapat didalam RUU KUHP, merupakan perbuatan pidana. Yang dimana hal ini memang dimungkinkan menjadi suatu perbuatan pidana, mengingat bahwa ketentuan hukum pidana yang bersifat khusus, dapat tercipta karena:⁷⁷

- a. Adanya proses kriminalisasi atas suatu perbuatan tertentu di dalam masyarakat. Karena pengaruh perkembangan zaman, terjadi perubahan pandangan dalam masyarakat. Sesuatu yang mulanya dianggap bukan sebagai Tindak Pidana, karena perubahan pandangan dan norma di masyarakat, menjadi termasuk Tindak Pidana dan diatur dalam suatu perundang-undangan Hukum Pidana;
- b. Undang-Undang yang ada dianggap tidak memadai lagi terhadap perubahan norma dan perkembangan teknologi dalam suatu masyarakat, sedangkan untuk perubahan undang-undang yang telah ada dianggap memakan banyak waktu;
- c. Suatu keadaan yang mendesak sehingga dianggap perlu diciptakan suatu peraturan khusus untuk segera menanganinya;
- d. Adanya suatu perbuatan yang khusus dimana apabila dipergunakan proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada akan mengalami kesulitan dalam pembuktian.

Hukuman terhadap pelaku santet memang tidak tertulis atau tercantum dalam KUHP yang berlaku saat ini. Tetapi lainhalnya dalam RUU KUHP versi pemerintah, pelaku santet kini dapat dijadikan suatu tindak pidana walaupun tidak secara spesifik mencantumkan kata “santet” di dalam RUU KUHP versi pemerintah.

Pemerintah mengusulkan agar soal penggunaan kekuatan gaib diatur dalam undang-undang. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menuangkan masalah itu dalam Pasal 293 RUU KUHP versi pemerintah. Direktur Jenderal Perundang-Undangan Kemenkumham, Wahidudin Adams beralasan, pasal itu dimasukkan untuk melindungi masyarakat. "Untuk melindungi masyarakat dari penipuan, dan janji dari orang yang menjanjikan dapat menggunakan gaib untuk

⁷⁷*Ibid.*, h. 17

membuat orang celaka dan menderita."⁷⁸ Selain itu, aturan santet akan membuat masyarakat tak main hakimsendiri pada orang yang diduga dukun santet. Ini ada dalam penjelasan pasal tersebut.

Di dalam RUU KUHP versi pemerintah pelaku santet dapat dikenakan hukuman, hal ini sebagaimana diatur oleh Pasal 293 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karna perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental dan fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV;
- 2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu pertiga).

Dalam rumusan tindak pidana Pasal 293 RUU KUHP versi pemerintah pada ayat (1), dapat dirinci unsur-unsur berikut ini:

- a. Perbutannya Menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan harapan, menawarkan jasa atau memberikan bantuan jasa;
- b. Objeknya : terhadap orang lain, bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang.

⁷⁸Penjelasan Wahidudin Adams dalam Tempo.com,*Alasan pemerintah atur santet*, diakses pada senin 9 Maret 2020

Ada empat macam perbuatan yang dilarang. Jika dihubungkan dengan objek tindak pidana, maka rumusan tindak pidana tersebut dapat dibedakan antara 4 macam tindak pidana:

Pertama : Tindak pidana menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib pada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang;

Kedua : Tindak pidana memberitahukan harapan pada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang;

Ketiga : Tindak pidana menawarkan jasa pada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang;

Keempat : Tindak pidana memberikan bantuan jasa pada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang.

Setelah dirinci demikian, rumusan tindak pidana dalam pasal 293 RUU KUHP versi pemerintah semakin jelas bahwasannya pelaku santet yang memiliki unsur-unsur sebagaimana dimaksud dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda kategori IV.

C. Analisis Persamaan dan Perbedaan *Assahir* dalam Hukum Pidana Islam dan RUU KUHP Versi Pemerintah

1. Persamaan

Ditinjau dari Rumusan RUU KUHP versi pemerintah dan hukum pidana Islam. Bahwa dari segi penghukumannya terhadap pelaku santet memiliki beberapa persamaan yaitu:

- a. Dalam Pasal 293 RUU KUHP versi pemerintah unsur yang terkandung ialah “menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib” ditinjau dari segi perbuatannya santet merupakan salah satu dari bentuk kekuatan gaib, sedangkan dalam hukum Islam yang berpedoman kepada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 102 menyatakan bahwa “...Barang siapa yang menukarkan (kitab Allah) dengan sihir tidaklah baginya keuntungan di akhirat dan amat jahatlah perbuatan mereka”. maka dari itu para fuqaha berpendapat bahwasannya pelaku sihir harus mendapatkan hukuman berdasarkan perbuatannya. Dengan kata lain baik dalam RUU KUHP versi pemerintah maupun hukum pidana Islam memiliki persamaan bahwasannya pelaku santet atau sihir harus ada hukumannya;
- b. Ditinjau dari segi penghukumannya dalam Pasal 293 RUU KUHP versi pemerintah merumuskan bahwa perbuatan santet yang dapat dihukum ialah yang dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang. Sedangkan menurut mayoritas jumhur ulama mengatakan, tidaklah di berikan hukuman

apabila dalam sihirnya tidak membunuh atau melukai seseorang, jadi tukang sihir yang membunuh atau melukai dengan sihirnya sajalah yang dapat dihukum. Dengan kata lain baik dalam RUU KUHP versi pemerintah maupun hukum pidana Islam dapat di tafsirkan bahwa hanya pelaku santet yang memiliki I'tikad jahat atau tidak baik sajalah yang dapat dikenakan sanksi hukuman.

2. Perbedaan

Ditinjau dari RUU KUHP versi pemerintah dan hukum pidana Islam. Bahwa dari segi hukumnya terhadap pelaku santet memiliki beberapa perbedaan yaitu:

- a. Dalam RUU KUHP versi pemerintah Pasal 293 ayat (1) bahwasannya “setiap orang yang menyatakan dirinya memiliki kekuatan gaib, memberitahukan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain dapat di pidana penjara. Sedangkan dalam hukum pidana Islam menyatakan dengan tegas bahwasannya apapun bentuk dan jenis sihirnya, apabila telah terbukti melakukan sihir dan sihirnya dapat melukai seseorang maka pelaku tersebut dapat dihukum. Dari pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa dalam RUU KUHP versi pemerintah melakukan santet atau sihir tanpa mengemukakannya di depan umum dan tanpa menawarkan jasa apapun yang mana ini semua didasarkan atas nama pribadi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan hukuman,

sedangkan dalam hukum pidana Islam tetap harus ada hukumannya;

- b. Ditinjau dari segi penghukumannya dalam RUU KUHP versi pemerintah Pasal 293 ayat (1), pelaku santet dapat di hukum pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV apabila terbukti perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut. Sedangkan dalam hukum pidana Islam tidak memiliki kepastian bentuk hukumannya. Karna penghukuman terhadap pelaku santet tidak secara spesifik dijelaskan dalam nash. Sehingga untuk segi penghukumannya digolongkan ke dalam kategori jarimah ta'zir, yakni hukuman yang menjadi kompetensi penguasa setempat. Adapun dalam penghukumannya jumhur ulama sepakat bahwasannya terhadap pelaku sihir hukumannya adalah dibunuh. Tetap berbeda dengan Rasulullah saw, beliau tidak menghukum Labid bin Al A'sham dikarenakan demi kemaslahatan umat.

3. Kekurangan dan Kelebihan Hukuman Pelaku Santet Dalam RUU KUHP Versi Pemerintah dan Hukum Pidana Islam.

Sihir atau santet merupakan suatu perbuatan jahat yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dengan maksud dan tujuan tertentu, dalam RUU KUHP versi pemerintah Pasal 293 terdapat beberapa kekurangan yaitu:

- a. santet merupakan bagian dari hal gaib, yakni perbuatan yang tidak dapat di telaah oleh logika manusia atau dengan kata lain

merupakan suatu perbuatan yang irasional. Maka dari itu penghukumannya memiliki kendala dalam hal pembuktian;

- b. RUU KUHP versi pemerintah Pasal 293 masih belum bisa sepenuhnya memberikan efek pencegahan terhadap pelaku santet. Karena pasal tersebut bukan merupakan pasal yang secara spesifik membahas mengenai santet;
- c. Pasal 293 RUU KUHP versi pemerintah di khawatirkan dapat memicu konflik atau menimbulkan permasalahan baru dikarenakan pasal tersebut tidak bisa menaungi dari teori tujuan pemidanaan yakni retributif-teleologis.

Ditinjau dalam hukum pidana Islam, penghukuman terhadap pelaku sihir atau santet memiliki kurang dari segi pembuktian. Karna santet merupakan hal yang irasional maka dalam hukum pidana Islam santet pembuktiannya hanya bisa dilakukan dengan ikrar (sumpah) karna menurut mazhab Syafi'i sebab tujuan pelakudan pengaruhnya dari santet adalah sesuatu yang tak dapat dilihat secara langsung. Didalam RUU KUHP versi pemerintah khususnya Pasal 293 terdapat beberapa kelebihan yaitu :

- 1) Walaupun bukan merupakan pasal santet, pelaku santet dapat dihukum apabila terpenuhinya unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 293 RUU KUHP versi pemerintah;
- 2) Karena pelaku santet merupakan hal yang *irasional* dan sulit pembuktiannya, maka dari itu Pasal 293 RUU KUHP versi pemerintah di masukan ke dalam bab V mengenai pelanggaran terhadap ketertiban umum, delik yang terkandung ialah delik formil sehingga akan sangat

mudah perihal pembuktiannya. Dalam Hukum pidana Islam terhadap pelaku sihir atau santet sangat tegas bahwasannya sihir adalah kafir dan seseorang yang kafir harus mendapat hukuman, walaupun penghukumannya berbeda-beda tetapi memiliki kepastian hukum. Dalam hukum pidana Islam Penghukuman terhadap pelaku santet memiliki tujuan yang sangat sesuai dengan teori *retributif-theologis*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang penulis paparkan tentang hukuman pelaku santet yang ditinjau dalam RUU KUHP versi pemerintah dan hukum pidana Islam, maka banyak hal yang sebenarnya bisa ditarik kesimpulan. Namun setidaknya penulis mencatat beberapa point penting yang menjadi inti dari pembahasan skripsi penulis.

1. Dalam hukum pidana Islam santet dikenal dengan kata *Assahir* (pelaku sihir/santet), menurut firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 102 : ilmu sihir atau pelaku sihir adalah perbuatan yang diharamkan, dan pelakunya bisa dikatakan kafir atau bisa menggugurkan keislamannya (*murtad*), menurut hadis Nabi hukuman Had bagi pelaku santet adalah dipukul dengan pedang (dihukum mati);
2. Hukuman terhadap pelaku sihir yang masuk dalam kategori ilmu gaib terkandung dalam pasal 293 RUU KUHP versi pemerintah yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak kategori IV. Dan jika perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga). Namun dalam pidana Islam hukuman bagi penyihir adalah Hukuma Had atau dipukul dengan pedang (dibunuh).
3. Kekurangan dalam penghukuman terhadap pelaku sihir atau santet ini ialah dalam hal pembuktian. Dikarenakan santet atau sihir ini merupakan sesuatu yang *irasional*, sedangkan kelebihan yang terdapat dalam RUU

KUHP versi pemerintah yaitu pelaku santet masih bisa dihukum dikarenakan dimasukkan ke dalam delik formil. Dalam hukum pidana Islam karna tegasnya hukuman sehingga bisa menyesuaikan terhadap teori tujuan pemidanaan itu sendiri, yakni teori retributif-teleologis.

B. Saran

Setelah penulis menarik kesimpulan dari uraian skripsi ini, penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Mengingat Pasal 293 RUU KUHP versi pemerintah bukanlah pasal santet melainkan tentang ketertiban umum, maka para *legislator* dan para penegak hukum harus melakukan sosialisai mengenai pasal tersebut yang sifatnya *kontinuitas* agar tidak ada salah paham di masyarakat.
2. Bilamana perlu ditegaskan dalam hukum pidana di Indonesia memasukkan delik-delik hukum Islam yang dapat membantu dalam menghukum para pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Al fara'i, *Fathul Qodir jilid I*, Darul Ma'rifat, Beirut Libanon, tt

Al-Kasani, 'Ala'Ad-Din, *Badai' Ash-Shanai' fi Fi Tartib Asy-Syara'i, Jilid VII*,
Daar Al-Fikr, Beirut, 1996

Al- Maqdisi, Abdullah Ibn Qudamah, *Al-Muqhni, Juz VII*, Dar Al- Manar, 1368

al-Mawardi Abu Hasan, *al- Ahkam al-Shulthaniah wa al-Wilayah al-Diniyah*,
Indonesia : Haramain, 2015.

al-Ghazi, Muhammad Abi Qasim, *Fathul Qarib Mujib*, Jakarta : Dar Qutub al-
Islamiyyah, 2003

Amir, Abdul Azis, *Ta'zir al-Syari'at al-Islam*, Beirut, Daar al-Fikr Arabi, 1969

As-Suyuthi, Jalaluddin, al-Ashbah wa Nadzhair, Surabaya: Haramain, tt

az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqhu Islam waa Adillatuhu*, Daar Fikr: Damaskus, 1989

Aziz Zainuddin Abdul al-Maliabari, *Fathul Mu'in bi Syarh Quratul 'Ain*,
Indonesia: Haramain, 2006.

Asy-Syaukani, Muhammad Ibn Ali, *Nail Al- Authar, Juz VII*, Dar Al-Fikr, tanpa
tahun.

As-Shiddiqi, T.M Hasbi, dkk, *Al-quran dan Terjemahnya*, Mujamma' Khadim
Al-Haramain Asy Syarifain, Madinah, 1971.

Az-Zurqoni, Muhammad ibn Abdul Baaqi, *Al-Mawaahibul Laduniyyah, Juz VII*,
Al-Azhaariyyah AL-Mishriyyah, 1327 H

Audah Abd Qadir, *Tasri' al-Jinai a-Islamiy, Juz I*, Cairo: Dar Hadits, 2009

Bello, Petrus C.K.L., *Ideologi Hukum*, Bogor. Insan Merdeka, 2013

Bakhri, Syaiful, *Beban Pembuktian*, Jakarta:Gramata Publishing, 2012

- Daud, Muhammad Isa, *Dialog Dengan Jin Muslim*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1996
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Sygma exagrafika, 2009.
- Djalil, Basiq, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Herusatto, Budiono, *Konsepsi Spriritual Leluhur Jawa*, Ombak, Yogyakarta, 2009.
- Ibnu Sa'ad, *Ath-Thobaqoot al-Kubro, jilid II*, Daarun Shaadir, Beirut, 1957
- Ibnu al-Qoyyim, *Za'dul Ma'ad, Juz V*, Daarul Ma'rifah: Beirut, 1993
- Irfan, Nurul. Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, Jakarta : Hamzah, 2013
- Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 2012
- Iqbal, Muhammad. *Ensiklopedi Ringkas Tentang Islam*. Jakarta: Taramedia, 2003
- K.Sukardi, *Agama Agama yang berkembang didunia dan pemeluknya*, Bandung, tanpa penertbit, 1993.
- Loqman, Loebby, *Analisis Hukum dan Perundang-Undangan Kejahatan terhadap Keamanan Negara di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1990
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2005
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet XIV, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Mujieb, M. Abdul, dkk. *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994

- Mufid, Ahmad syafi'I Tangklukan, *Abangan, dan Tarekat*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Zain bin Faqih Jalaluddin al-Asyiy Muhammad, *Bidayatul Hidayah fi syarh Umm al-Barahin*, Medan: Pustaka Asyirah Aswaja, 2019
- Prasetyo, *Teguh Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2010
- Pundari, Ketut Nihan, *Eksistensi Kejahatan Magis dalam Hukum Pidana*, Jurnal Fakultas Hukum Univ. Udayana, tt
- Salam, Wahid Abdus Bali, *Sihir Dan Cara Pengobatannya Dalam Islam.*, Jakarta: Robbani Press, 1995
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014.
- Sukiati, Metodologi Penelitian sebuah Pengantar, Medan : Perdana Publishing 2017.
- Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum Upaya Menemukan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Pers, 2006
- Suyono R.P, *Dunia Mistik Orang Jawa Roh, Ritual, Benda Magis*, LKIS, 2007, Yogyakarta.
- Unais, Ibrahim Al- *Mu'jam Al-Wasith, Juz II*, Dar Ihya' At-Turats Al-Arabi, t.t
- Utsaimin, Ibnu, *Syarah Al Kabaair Lil Imam Adz Dzahabi*, Jakarta: Daar Al-Kutub 'Ilmiyah, 2003

Ungkapkan Ronny dalam diskusi, '*Pasal Santet Dalam Naskah Revisi UU KUHP*' di Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, www.detiknews.com, diakses pada, Rabu (14/1/2020).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. KETERANGAN DIRI

1. NAMA : YAYUK ANNISA
2. Tempat/Tanggal Lahir : Desa Baru, 14 April 1997
3. NIM : 25153015
4. Jurusan : JINAYAH (Hukum Pidana Islam)
5. Semester : 10 (sepuluh)
6. Tahun Ajaran : 2015
7. Jenis Kelamin : Perempuan
8. Agama : Islam
9. Status Perkawinan : Belum Menikah
10. Pekerjaan : Mahasiswa
11. Alamat : Desa Baru Dusun I Rambungan, Batang Kuis
12. Riwayat Pendidikan : SDN 104230 Tanjung Sari 2003-2009
SMP N 1 Batang Kuis 2009-2012
SMA Swasta Cerdas Murni Tembung 2012-2015
13. Riwayat Pekerjaan : -
14. Riwayat Organisasi : Pramuka, Marching Band

B : KETERANGAN KELUARGA

1. NAMA Ayah : Tukiran
2. Pekerjaan Ayah : Buruh
3. Nama Ibu : Syafrida
4. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
5. Jumlah saudara : 3(tiga)
6. Anak ke : 1 (satu)

C. KETERANGAN WALI

1. Nama Wali : Suliadi
2. Pekerjaan Wali : Wiraswasta

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sungguh-sungguh
dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar maka penulis
bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan
yang diambil oleh pemerintah.

Medan :2020

Mengetahui : yang membuat

PD. Bidang Akademik,

Dr. Arifuddin Muda Harahap M.Hum

Yayuk Annisa